

# DPRD Sumut Segera Bentuk Pansus Pencemaran Danau Toba



**Sutrisno Pangaribuan**  
(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 5/2 (LintasMedan) – DPRD Provinsi Sumatera Utara berencana segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas secara menyeluruh kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Danau Toba yang kian mengkhawatirkan.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan kepada pers, di Medan, Selasa tugas pokok yang akan dibahas pansus tersebut bukan hanya sebatas pencemaran lingkungan, tetapi juga dampak yang lebih luas yang ditimbulkan oleh pemanfaatan danau tersebut yang selama ini mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

“Kondisi air Danau Toba dan ekosistemnya sekarang ini hampir tidak memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, termasuk dari aspek ekonomi,” ujar politisi muda PDIP itu.

Ia menambahkan, masalah krusial di kawasan Danau Toba yang

akan dibahas Komisi D DPRD Sumut tidak hanya sebatas gencarnya aksi pembuangan bangkai ikan ke perairan danau itu yang diduga berasal dari PT Aquafarm, tetapi faktor pemicu matinya ikan tersebut.

Kuat dugaan, kata Sutrisno banyaknya ikan mati di Danau Toba akhir-akhir ini akibat air Danau Toba semakin tercemar limbah domestik dan pakan.

Untuk memulihkan kondisi lingkungan Danau Toba, kata Sutrisno mutlak dibutuhkan kajian ilmiah serta sikap tegas pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku dan dukungan nyata dari segenap elemen masyarakat.

Ia menilai aktifitas pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana Kerambah Jaring Apung (KJA) di dalam danau tersebut ikut memperparah kasus pencemaran air Danau Toba.

Disebutkannya, salah satu perusahaan budidaya ikan yang diduga kuat ikut menyumbang pencemaran air Danau Toba adalah PT Aquafarm Nusantara.

Perusahaan penanaman modal asing ini, kata dia, disinyalir juga tidak menerapkan sistem pengelolaan budi daya ikan air tawar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah RI.

Bahkan, PT Aquafarm Nusantara diduga pernah membuang sejumlah ikan mati ke Danau Toba sehingga menambah tingkat pencemaran air di danua terbesar di Asia itu.

“Kami sudah menjadwalkan melakukan peninjauan langsung untuk melihat berbagai kegiatan usaha yang rawan terjadi pencemaran lingkungan di Danau Toba, seperti hotel, restoran dan KJA baik milik perusahaan maupun masyarakat,” ucapnya

Rombongan komisi D DPRD Sumut dijadwalkan melakukan kunjungan ke lapangan pada 21 Pebruari 2019.

Dari hasil kunjungan tersebut, kata dia Komisi D DPRD Sumut

akan membentuk pansus Danau Toba

Ia berharap pansus Danau Toba DPRD Sumut kelak mampu mengeluarkan rekomendasi berisi penutupan seluruh aktifitas KJA dan mengembalikan fungsi danau tersebut sebagai pusat ekowisata berbasis lingkungan.

Sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menegaskan pihaknya mendukung upaya penegakan hukum terhadap kasus pencemaran lingkungan di Danau Toba, termasuk pembuangan bangkai ikan yang diduga milik PT Aquafarm Nusantara. (LMC-02)

---

## **Politisi Demokrat: Tim Pemenangan Prabowo-Sandi di Sumut Belum Solid**



**Muhri Fauzi Hafiz.**  
(Foto:LintasMedan/ist)

Medan, 4/2 (LintasMedan) – Politisi Partai Demokrat Sumut,

Muhri Fauzi Hafiz menilai koordinasi antarpol yang tergabung dalam tim pemenangan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini belum solid.

“Padahal, koordinasi dan soliditas antarpol koalisi pendukung Prabowo-Sandi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kampanye untuk pemenangan pasangan capres-cawapres tersebut,” katanya kepada pers di Medan, Senin.

Seperti diketahui pasangan Prabowo-Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Muhri yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut menyatakan namanya termasuk sebagai salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk wilayah Sumut, sebagaimana data resmi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, ia mengaku belum menerima salinan surat keputusan (SK) tentang pengangkatan dirinya sebagai salah satu anggota BPN Prabowo-Sandi yang diketuai oleh Jenderal (Purn) Djoko Santoso tersebut.

“Jadi hal ini bukan karena ketidakpedulian, tetapi sepertinya rapat-rapat pun belum pernah digelar. Bahkan, SK dari BPN pun belum ada saya terima,” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, seluruh parpol pengusung maupun pendukung yang tergabung dalam BPN Prabowo-Sandi di Sumut selalu berkomunikasi dan berkoordinasi melalui rapat-rapat rutin.

Muhri menyatakan ingin BPN di Sumut benar-benar berperan sebagai lokomotif tim pemenangan Prabowo-Sandi.

Sayangnya ia menilai keinginan tersebut belum terwujud dan bahkan peran itu lebih banyak didominasi oleh para pendukung dan simpatisan yang tergabung dalam “Relawan Ganti Presiden

2019”.

“Kinerja BPN Prabowo Sandi di Sumut harus segera dievaluasi dan capres dan cawapres nomor urut 02 harus mengetahui permasalahan ini,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan jika koordinasi antar parpol pendukung Prabowo-Sandi di Sumut belum juga terealisasi, tidak tertutup kemungkinan dapat berdampak terhadap perolehan suara pasangan itu di provinsi ini. Sementara, jadwal pemungutan suara Pemilu 2019 sudah semakin mendekat.(LMC-02)

---

## **Tengku Ryan-Ariska Jalani Prosesi Pernikahan di Istana Maimun**



Tengku M. Ryan Novandi (ketiga kiri) dengan Ariska Putri Pertiwi (ketiga kanan)

berfoto bersama kedua orang tua mereka usai mengikuti prosesi pernikahan secara adat Melayu di Istana Maimun Medan, Jumat (1/2). Tengku M. Ryan Novandi adalah putra sulung mantan gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kanan). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 1/2 (LintasMedan) – Pernikahan putra sulung mantan gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Tengku M. Ryan Novandi dengan Ariska Putri Pertiwi diisi dengan acara prosesi adat Melayu di Istana Maimun Medan, Jumat (1/2).

Sebelumnya, pada hari yang sama atau pagi hari, pasangan pengantin ini melangsungkan akad nikah di Masjid Raya Al Mashun Medan.

Pada prosesi adat di Istana Maimun, sang pengantin mengenakan pakaian kebesaran Melayu berwarna kuning keemasan yang dipadukan dengan warna kuning muda.

Sementara kedua orangtua mempelai juga mengenakan setelan pakaian Melayu berwarna kuning.

Ika sapaan akrab Ariska Putri Pertiwi terlebih dahulu tiba di Istana Maimun. Kemudian sehabis shalat Jumat, rombongan Ryan, panggilan Tengku M. Ryan Novandi tiba.

Ryan naik diatas tandu yang dipikul empat orang dari halaman Istana Maimun menuju tangga pintu masuk istana Kesultanan Deli tersebut.

Sebelum menuju pelaminan, pengantin wanita telah menunggu, Ryan dan keluarga dihadang bentangan kain panjang atau di dalam istilah adat pernikahan Melayu disebut palang pintu yang dijaga dua orang pemuda.

Pada momentum itu, utusan pengantin pria dan pengantin wanita saling berbalas pantun sebelum membuka palang pintu tersebut.

Selanjutnya, pengantin pria di antar menuju pelaminan. Namun sesampai disana dia tidak langsung diperbolehkan duduk di pelaminan yang sedang dijaga oleh dua orang wanita yang juga merentangkan kain panjang.

Pada acara yang disebut hampang kipas ini para penjaga ini ingin kembali memastikan syarat adat yang harus diberikan.

Setelah syarat adat dipastikan telah terpenuhi, kedua mempelai baru diperbolehkan bersanding di pelaminan.

Proses pernikahan adat Melayu itu diisi dengan acara doa bersama yang dilanjutkan dengan acara tepung tawar sebagai tradisi turun menurun yang telah lama dilakukan masyarakat Melayu guna mensucikan diri.

Acara ditutup dengan makan hadap-hadapan lengkap dengan lauk-pauknya dan aneka kue. Acara ini hanya diperbolehkan dihadiri oleh kaum ibu dari kedua belah pihak.

Prosesi pernikahan adat Melayu tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh Sumut, luar Sumut serta sahabat Ryan dan Ariska dari mancanegara.

Seperti diketahui, Ryan pernah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat dan Ariska Putri Pertiwi merupakan Miss Grand International 2016 yang bergelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.

Resepsi pernikahan Tengku M. Ryan Novandi dengan Ariska Putri Pertiwi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (2/2) malam.  
**(LMC-02)**

---

# **KONI Kabupaten/Kota se Sumut Belum Sampaikan Pertanggungjawaban Keuangan**



**Rapat Anggota Tahunan KONI Sumut di Gedung Sudirman Li Polonia Hotel, Jumat (25/1) malam. (Foto:LintasMedan/Irmayuni)**

Medan, 25/1(LintasMedan) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara mendesak pengurus KONI Kabupaten/Kota untuk segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada induk organisasi itu.

Menurut Ketua KONI Sumut, Jhon Lubis hingga saat ini sejumlah KONI kabupaten/kota se Sumut belum juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana yang berasal dari bantuan hibah APBD 2018 kepada KONI Sumut.

Hal itu diungkap Jhon Lubis pada pembukaan Rapat Anggota KONI Sumut 2019, Jumat malam.

“Saya akan melaporkan hal ini ke inspektorat,” sesal Jhon

Lubis.

Menurut dia ada sejumlah temuan anggaran penggunaan APBD di organisasi itu akibat terkesan tidak ada niat baik dari KONI Kabupaten/Kota dalam memberi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dia memaparkan temuan paling banyak dalam alokasi penggunaan dana APBD adalah di sektor kegiatan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumut dan melibatkan sejumlah KONI kabupaten/kota.

Meski pada saat kegiatan tersebut sudah ada beberapa KONI kabupaten/kota yang memberi laporan. Namun menurut Jhon sebagian besar KONI daerah masih belum menyampaikannya.

“Jadi segeralah sampaikan pertanggungjawaban keuangannya, atau segera saya lapor ke inspektorat,” tegasnya tanpa menyebutkan nama-nama KONI kabupaten/kota yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut.

Selain meminta laporan pertanggungjawaban keuangan kepada KONI kabupaten/kota, KONI Sumut juga mengungkap sejumlah induk organisasi cabang olahraga yang belum menyampaikan laporan kegiatan.

Sedikitnya, kata Jhon Lubis ada 21 Pengprov cabang olahraga yang belum menyampaikan laporan kegiatan berupa hasil, Selekda, Kejurda maupun Kejurnas. Bahkan dari jumlah tersebut ada yang sama sekali tidak melaksanakan kegiatan, yang menurut Jhon juga menjadi suatu dilema.

“Untuk minta laporan hasil kegiatan saja pun sangat sulit. Padahal di 2019 ini, seharusnya Pelatda Program Sumut Emas (PSE) sudah berjalan. Bahkan ada yang tidak melaksanakan kegiatan sama sekali,” katanya.

Adapun nama sejumlah Pengprov cabang olahraga yang hingga kita belum menyampaikan laporan kegiatan, di antaranya, FPTI,

IKASI, IMI, IODI, ISSI, Kodrat, Muay Thai, PBI, PCI, Perbasi, Perkemi, Perpni, PGI, PJSI, dan PODSI. (LMC-02)

---

# Pemprov Didesak Percepat Realisasi Penambahan Modal Bank Sumut



Pembicara terdiri dari Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut Edy Riswan (kiri), Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap (kedua kiri) dan pengamat ekonomi Gunawan Benjamin (kedua kanan) dipandu moderator Sarsin Siregar (kanan), memberikan paparan saat diskusi publik di Medan, Kamis (24/1). Diskusi tersebut mengusung tema Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera

Utara. (Foto: LintasMedan/Irma)

Medan, 24/1 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat segera merealisasikan penambahan penyertaan modal ke PT Bank Sumut sesuai yang diamanahkan dalam peraturan daerah (Perda).

“Kami berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong percepatan penambahan modal Pemprov Sumut ke PT Bank Sumut, karena Perdanya telah disahkan oleh DPRD Sumut pada 20 Desember 2018” kata Ketua DPRD Provinsi Sumut, Wagirin Arman dalam acara diskusi publik yang digelar Forum Jurnalis Peduli Bank Sumut, di Medan, Kamis.

Dalam diskusi publik bertema ‘Mengoptimalkan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Sumut Dalam Memajukan Perekonomian Rakyat Sumatera Utara’ tersebut, Wagirin mengemukakan bahwa realisasi penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut efektif memperkuat daya saing perusahaan tersebut di industri perbankan dalam negeri.

Melalui realisasi penambahan penyertaan modal, kata dia, kepemilikan saham Pemprov Sumut di bank tersebut bisa segera meningkat hingga di atas 50 persen.

Pihaknya juga berharap Bank Sumut mempunyai daya saing tinggi sehingga mampu berperan nyata mendorong laju pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita berharap dengan penambahan penyertaan modal tersebut Bank Sumut dapat semakin ekspansif dan meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat Sumut,” kata Wagirin.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut M. Hanafiah Harahap berpendapat, keputusan mengenai besaran penambahan penyertaan modal Pemprov Sumut ke bank tersebut hendaknya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank

Sumut sekitar Maret 2019.

“Penambahan modal Pemprov Sumut ke Bank Sumut hendaknya direalisasikan sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden pada April 2019,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Gubernur Sumut selaku pemegang saham pengendali harus memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan lambanya realisasi penambahan modal ke Bank Sumut.

### **Strategis**

Pengamat Ekonomi Sumut Gunawan Benjamin menilai peran PT Bank Sumut dalam sistem perekonomian daerah sangat penting dan strategis, terutama sebagai penyeimbang kekuatan pasar atau industri keuangan serta turut berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menurutnya, pelepasan sebagian saham ke publik melalui skema initial public offering atau IPO merupakan salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan Bank Pembangunan Daerah Sumut untuk bisa lebih maju.

“Dengan modal di Bank Sumut yang semakin besar, maka kinerja bank itu semakin bagus. Keuntunganlainnya adalah bisa terbebasnya Bank Sumut dari kepentingan politik,” tuturnya.

Kepala Divisi Perencanaan PT Bank Sumut, Edy Riswan memaparkan, Bank Sumut sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki misi mengelola pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

“Bank Sumut juga sangat memperhatikan soal penyertaan modal dan dalam menjalankan bisnis keuangan selalu menjaga rasio keuangan yang menjadi indikator,” katanya.

Disebutkannya, komposisi modal Pemprov Sumut di Bank Sumut saat ini masih sekitar 41,87 persen atau menurun dibanding posisi pada akhir 2016 sebesar 48,94 persen.

Sepanjang tahun 2018, Bank Sumut berhasil menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp701 miliar lebih atau melampaui target yang sebesar Rp 700 miliar.

Dari jumlah tersebut, kata Edy Riswan, sebanyak Rp1 triliun merupakan KUR ritel dan sisanya adalah KUR mikro.

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja penyaluran KUR tahun 2019, kata dia, Bank Sumut tengah memaksimalkan penyaluran pada 135 unit kantor.

“Bank Sumut akan terus berbenah diri agar semakin maju sehingga bisa memberi manfaat besar juga pada masyarakat Sumut,” ucapnya.

(LMC-02)

---

## Polda Sumut Apresiasi Program PWI dan SMSI



Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin ((keenam kanan) berfoto bersama pengurus PWI dan Serikat Media Siber Indonesia

(SMSI) Sumut, di Medan, Selasa (22/1).  
(Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 22/1 (LintasMedan) – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara mengapresiasi sekaligus mendukung program PWI dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) setempat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memverifikasi perusahaan media online berbasis berita di daerah tersebut.

“Kami menilai program PWI dan SMSI Sumut sangat tepat dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme jurnalis,” kata Wakapolda Sumut, Brigjend Pol Mardiaz Husin, saat mwnweima audensi pengurus SMSI Sumut dan Ketua PWI Sumut Hermansyah, di Mapolda Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa.

Menurut Wakapolda, kerjasama tersebut segera disepakati dalam bentuk naskah kesepahaman bersama (MoU) antara Polda Sumut, PWI dan SMSI.

Salah satu bentuk kerja sama itu adalah mendukung bidang Humas Polda Sumut dalam hal penyediaan data mengenai perusahaan media online berbasis berita yang telah terverifikasi .

Selain itu pihaknya juga akan bekerjasama dengan PWI Sumut dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah mengikuti UKW.

Keberadaan data perusahaan media online yang telah terverifikasi dan jurnalis yang telah mengikuti UKW, kata Mardiaz, dibutuhkan oleh jajaran Poldaa Sumut dalam rangka melayani wartawan yang hendak melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan lembaga kepolisian itu.

Selama ini, dia memperkirakan wartawan yang melaksanakan peliputan berita di lingkungan Polda Sumut belum seluruhnya mengikuti UKW, sebagaimana diintruksikan oleh Dewan Pers.

“Kita ingin seluruh wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di jajaran Polda Sumut, telah lulus UKW,” katanya.

Menanggapi harapan Mardiaz Husin, ketua PWI Sumut Hermansyah menyatakan pihaknya siap memberikan bantuan konsultasi bidang penerangan Polda setempat dalam hal mendapatkan data jurnalis yang telah lulus UKW berikut nama-nama perusahaan media online yang telah terverifikasi.

Dia menegaskan, wartawan dalam melaksanakan tugas dan profesinya wajib mengikuti UKW dan perusahaan pers tempat mereka bekerja harus memiliki badan hukum.

Hermansyah yang juga Ketua Penasihat SMSI Sumut menambahkan, pihaknya hingga saat ini telah melaksanakan 24 kali kegiatan UKW dan sekitar 700 lebih pesertanya telah dinyatakan lulus.

Sementara itu ketua SMSI Sumut, Zulfikar Tanjung menuturkan, pihaknya bersama dewan pers telah memverifikasi sekitar 24 perusahaan media online berbasis berita.

“Perusahaan media online berbasis berita wajib berbadan hukum (PT), sebagaimana surat edaran dewan pers” ujarnya.

Hadir dalam audensi itu, antara lain, Sekretaris SMSI Sumut, Erris J Napitupulu, Austin Tumengkol dan Roni Purba (penasihat), T Nico Adrian dan Chairum Lubis (Wakil Ketua) .

Sementara Wakapolda Sumut didampingi Kadiv Propam, Kombes Pol Yopie Giriando Putro, Kombes Pol Maruli Siahaan dan AKBP MP. Nanggolan. (LMC-02)

---

**DPRD : Pemko Medan Tidak  
Serius Tegakkan Sejumlah**

# Perda



Anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Jangga Siregar saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Senin (21/1) di DPRD Medan. (Foto:LintasMedan/irma)

Medan, 21/1 (LintasMedan) – Kalangan Fraksi di DPRD Kota Medan menilai Pemko Medan tidak serius menegakkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda), termasuk Perda nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

“Penilaian Medan sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia adalah wajar karena ada sejumlah Perda yang memang tidak serius dijalankan selama ini,” kata anggota Fraksi Hanura DPRD Medan Jangga Siregar saat membacakan pandangan fraksinya pada paripurna Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh, Senin.

Fraksi Hanura menilai selain masalah sampah, kota Medan juga terlihat semakin tidak tertata dan kotor akibat cukup banyak bangunan yang tak sesuai dengan perencanaan tata ruang, ditambah lagi drainase yang buruk dan pembuangan air limbah sembarangan.

Hanura sangat prihatin dengan pesatnya pertumbuhan pemukiman kumuh di Kota Medan.

“Jumlah perumahan dan pemukiman kumuh terus meningkat dan tidak tertata, bahkan kerap mengakibatkan terjadinya banjir. Kondisi Kota Medan juga semakin tercemar akibat limbah rumah tangga dan industri yang tidak memiliki amdal,” paparnya.

Banyaknya pemukiman kumuh, juga menurut fraksi Hanura menjadi salah satu indikasi kemiskinan terus meningkat di Kota Medan, meski Pemko Medan telah membuat peraturan daerah nomor 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Hal senada juga diungkap Fraksi PAN DPRD Medan melalui juru bicaranya Kuat Surbakti

Menurut Fraksi PAN, banyaknya perumahan dan pemukiman yang tidak layak/kumuh dipastikan akan mengurangi kualitas hidup.

Untuk itu perumahan kumuh perlu dicegah dan perlu dikelola secara terpadu dan profesional dengan membentuk Perda.

Namun setelah Perda tersebut disetujui oleh kalangan legislatif, Fraksi PAN meminta Pemko Medan untuk segera mengeluarkan Perwal agar bisa dilaksanakan.

Fraksi PAN, kata Kuat Surbakti sangat menyayangkan selama ini banyak Perda yang telah disetujui dan disahkan namun tidak bisa dilaksanakan karena belum ada Perwal.

Data yang diterima DPRD Kota Medan terdapat sejumlah pemukiman kumuh di 28 kecamatan dan 52 kelurahan di Kota Medan.

“Ini juga masih data beberapa tahun lalu dan diyakini jumlah

tersebut terus bertambah,” katanya.

Sejumlah Fraksi di DPRD Medan menyetujui Ranperda Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Pemukiman Kumuh untuk dibuat menjadi Perda.

“Harus ada kebijakan sehingga ada pengurangan kawasan kumuh di Kota Medan, Pemko juga harus serius menjalankan Perda itu,” ucap Kuat Surbakti pada paripurna yang dihadiri walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Akhyar Nasution dan Sekda Wirya Alrahman. (LMC-02)

---

## **PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Medan**



Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution (kiri) didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Qamarul Fattah (kanan) memimpin rapat sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Wilayah Kota Medan, di Balai Kota Medan, Rabu (16/1). (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 16/1 (LintasMedan) – Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution mengungkapkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melanjutkan pembangunan sejumlah sarana infrastruktur di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Terkait dengan rencana tersebut, Akhyar saat memimpin rapat Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Medan, Rabu (16/1), menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di jajaran Pemko Medan untuk terus berkoordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan.

“Dengan sinergitas yang dilakukan, kita harapkan rencana pembangunan nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Medan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepadatan arus lalu lintas di Medan saat ini semakin tinggi, sehingga perlu segera dibangun sarana infrastruktur baru guna mengurai kemacetan di wilayah tersebut.

Adapun proyek itu, antara lain pembangunan jembatan layang, jalan under pass di simpang Jalan Asrama/Jalan Gatot Subroto (Pondok Kelapa), pelebaran jembatan penyeberangan jalan tol di Tanjung Mulia, pelebaran Jalan Jamin Ginting depan kompleks Citra Garden serta pelebaran di simpang Jalan Yos Sudarso/Jalan Titi Papan (Simpang Dobi).

Menurut dia, pembangunan sarana infrastruktur itu kelak bisa merubah wajah lalu lintas Kota Medan menjadi lebih baik dan masyarakat pengguna jalan dapat merasakan manfaatnya.

Selama ini, menurut Wakil Wali Kota, di kawasan yang menjadi titik lokasi proyek pembangunan infrastruktur tersebut kerap terjadi macet, terutama pada pagi dan sore hari.

Diakuinya, kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Jamin

Ginting, misalnya, kondisi itu tidak terlepas dengan keberadaan sejumlah pool angkutan dan loket penjualan tiket bus.

Oleh karena itu, ia berharap kepada seluruh OPD terkait agar fokus mendukung pembangunan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

“Kita semua bertanggung jawab untuk memberi ruang dan kemudahan bagi semua pengguna jalan. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh OPD terkait agar serius mendukung pengerjaan yang akan dilakukan nantinya,” ucap dia didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Qamarul Fattah.

Sebelumnya perwakilan dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dalam rapat tersebut memaparkan secara singkat rencana pembangunan fly over, pelebaran jembatan penyeberangan dan pelebaran jalan. (LMC-04)

---

## Kementerian ATR/BPN Serahkan 500 Sertipikat di Medan



Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Sofyan A Djalil (kiri) disaksikan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (tengah), menyerahkan secara simbolis sertipikat tanah kepada sejumlah warga, di aula Hijir Ismail Jalan Garu III Medan, Selasa (8/1).  
(Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/1 (LintasMedan) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Pertanahan Kota Medan menyelesaikan 500 sertipikat tanah dan menyerahkan langsung ke masyarakat di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu.

Sebanyak 500 sertipikat tersebut merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Tahun Anggaran 2018 dan diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI Sofyan A Djalil dan Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin di aula Hijir Ismail Jalan Garu III Medan, Selasa (8/1).

Prosesi penyerahan sertipikat tanah tersebut turut disaksikan, antara lain Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Ari Yuriwin, Kepala Kanwil BPN Sumut Bambang Priyono, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Fachrul Husin Nasution dan sejumlah unsur Forkopimda Kota Medan.

“Saat ini pendaftaran tanah sedang mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Untuk itu, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terus melaksanakan program ini secara serius,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang /BPN RI, Sofyan A Djalil.

Ia menuturkan jumlah sertifikat tanah yang dibagikan kepada masyarakat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak 2015.

“Tahun 2019, kita tergetkan sebanyak 900 ribu bidang tanah

kita upayakan akan bersertifikat. Selanjutnya tahun 2021, kita tergetkan seluruh tanah di Kota Medan akan terdaftar dan bersertifikat,” paparnya.

Sofyan menambahkan ada beberapa hambatan dan kendala dalam program sertifikasi tanah selama ini antara lain pertama yaitu kendala jaringan di daerah, sehingga “input” capaian dalam sistem menjadi lebih lambat. Kedua, partisipasi masyarakat masih rendah karena ketakutan pembayaran pajak jika sertifikat sudah jadi.

Selain itu, pemahaman masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) yang kurang tepat, terutama dalam pembayaran pra-PTSL yang tidak ditanggung oleh APBN.

Kemudian, pemahaman hukum yang berbeda-beda atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Ia menegaskan, Pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN berupaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah miliknya melalui program PTSL.

Disebutkannya, dari sebanyak 128 juta bidang tanah di Indonesia, hingga sekarang ini baru sekitar 48 juta tanah yang telah disertipikat.

“Sisanya 80 juta bidang tanah lagi belum memiliki sertifikat, karena itu Pemerintah melalui PTSL berupaya membantu mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah. Ditargetkan tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat,” kata Sofyan.

Pada kesempatan itu, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin menyatakan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Medan.

“Atas nama Pemko Medan, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian sertifikat tanah kepada 500 warga Kota Medan melalui program PTSL. Tentunya program ini dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta untuk mengurangi potensi terjadinya sengketa dan konflik di tengah masyarakat,” katanya.

Usai penyerahan sertifikat, Menteri ATR/BPN bersama Walikota Medan dan unsur Forkopimda melakukan pematokan secara simbolis tanda batas tanah di beberapa rumah milik warga di Jalan Garu III Medan.

Sebelumnya, acara penyerahan sertifikat tanah gratis juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas tersebut ditandatangani oleh Walikota Medan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, Kapolrestabes Medan beserta unsur Forkopimda Kota Medan, PPAT serta REI Kota Medan. (LMC-04)

---

**Dzulmi Eldin Terima  
Penghargaan dari Kemenag RI**



Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin (kanan) dalam rangkaian acara memperingati Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan, Senin (7/1). Dzulmi Eldin merupakan salah satu dari sejumlah pejabat dan tokoh yang dinilai turut berperan besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan pembangunan keagamaan di Sumut. (Foto: LintasMedan/ist)

Medan, 8/1 (LintasMedan) – Walikota Medan, H.T Dzulmi Eldin menerima penghargaan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI karena dinilai turut berperan besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama dan pembangunan keagamaan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Agama (Menag) RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam rangkaian acara memperingati Hari Amal Bhakti ke-73 Kemenag RI di Medan, Senin (7/1).

Selain Eldin, penghargaan serupa juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang juga mendapatkan penghargaan dari Menag, di antaranya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Bupati Langkat Ngogesa

Sitepu serta Tuan Guru Babussalam Syekh Haji Hasyim Al-Syarwani.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan selamat kepada kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah mendapatkan penghargaan.

Ia berharap penghargaan itu semakin memotivasi para pejabat dan tokoh masyarakat di Sumut untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam mendukung upaya terciptanya kerukunan umat beragama.

Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kemenag RI tersebut.

“Penghargaan ini tentunya capaian yang sangat membanggakan bagi warga Kota Medan yang selama ini hidup dengan rukun, saling menghargai dan menghormati, meski berbeda suku maupun agama,” ujarnya.

Pemko Medan, menurut Eldin, selama ini selalu mendukung penuh setiap kegiatan agama yang digelar dan senantiasa bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kota Medan.

“Dengan sinergitas yang kita bangun dengan FKUB dan dukungan yang dilakukan Pemko Medan terhadap setiap kegiatan keagamaan yang digelar, Alhamdulillah, kehidupan beragama di Kota Medan berjalan dengan sangat baik,” tuturnya.

Karena itu, kata Walikota, Medan sering menjadi barometer dan contoh kerukunan umat beragama di Indonesia. (LMC-04)